



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kehidupan politik negara, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pemilihan umum melalui pelaksanaan demokratis sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban politik warga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain agar pemilu dapat berdaya guna perlu adanya pelibatan partisipasi masyarakat seluas-luasnya demi terciptanya legitimasi terhadap sistem pemilu dan pemerintahan terpilih.

Menurut Wardhani (2018, p. 58) dalam penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi politik dimaknai sebagai tindakan aktif masyarakat dalam pesta demokrasi (pemilu). Hasil pemilu akan terlihat mempunyai legitimasi yang kuat apabila diikuti nilai partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, bila angka partisipasi politiknya rendah, bisa diartikan bahwa masyarakat kurang menaruh perhatian kepada proses pemilu yang telah berlangsung. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dinyatakan dalam sikap golput (golongan putih). Menurut peneliti, keberadaan partisipasi politik atau partisipasi pemilih dalam momen pemilu adalah suatu hal penting untuk ditilik, karena tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Pada pemilihan umum 2019 ini, pelaksanaan pemilu dilakukan melalui mekanisme pemilu serentak. Penyelenggaraan pemilu serentak tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017. Bila dilihat dari sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak 2019 dinobatkan menjadi pemilu pertama dan terumit yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersama-sama (Hermawan, 2018, para.1 ).

Pembaharuan sistem pemilu yang semula bertahap menjadi serentak bukan serta merta tanpa masalah. Ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerawanan/konflik yang menyelimuti pemilu serentak nantinya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Permasalahan dan Tantangan Pemilu Serentak

Permasalahan/Tantangan
Politik uang
Berita bohong/ <i>fake news</i>
Golput/golongan putih
Potensi teknis pemilu
Sengketa hasil pemilu pileg/eksekutif

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019

Dari potensi kerawanan pemilu di atas, selanjutnya pemilu serentak 2019 selalu dipenuhi dengan intrik-intrik gaya berpolitik intimidasi yang dilakukan politisi, menguatnya narasi negatif yang mengarah kepada ujaran kebencian, bercampur propaganda politik menurut Tjahyo Kumolo, hal tersebut kerap dipolitisasi secara ekstrim untuk menggiring opini publik demi

tercapainya suatu jabatan/kekuasaan tertentu (“Ujaran Kebencian Jadi Tantangan”, 2018, para 3). Menurut peneliti, tindakan pragmatis para politisi di atas sangat merusak iklim demokrasi dan mencoreng etika berpolitik. Wajar bila pemilih tidak bersimpati dengan adanya pemilu, karena tidak ada nilai kebermanfaatan dan substansi yang bisa di ambil dari para politisi ketika mereka saling berpendapat di berbagai jejaring media massa dan media sosial. Dengan demikian, bila realitas politiknya tidak berubah, diprediksi angka golput (*abstain*) dalam pemilu serentak 2019 berpotensi meningkat (Oktaviyani, 2019, para.1).

Pada pemilu serentak 2019 ini, menurut studi DPP fisipol UGM, terjadi perbincangan dan ajakan tidak memilih (golput) di media sosial semakin masif. Dari 2.840 percakapan mengenai golput di Twitter, 9,5% ditujukan untuk mengkampanyekan golput (Sahana, 2019, para. 4). Percakapan melalui Twitter diekspresikan oleh pengguna melalui berbagai jenis tagar yang berbicara soal golput serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam mengkampanyekan golput kepada masyarakat, seperti #marigolput, #coblossamping, #2019tetapgolput, dan #pemilumembunuhmu.

Perbincangan yang semakin *intens* tidak hanya terjadi di dunia maya. Melalui sebuah komunitas Saya Memilih Golput (SMG) secara terbuka akan menyatakan golput pada pemilu tahun ini. Pernyataan sikap tersebut bukan tanpa alasan, menurut koordinator SMG, Bagas Denny Saputra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses politik yang diciptakan hanya

untuk kepentingan sesaat, bukan mengedepankan edukasi politik kepada masyarakat terlebih kepada pemilih pemula (Qodar, 2019, para 1-3).

Di tengah keriuhan pemilu serentak, menurut Solihah (2018, p. 84) keberadaan informasi terkait pemilu baik partai politik dan calon kandidat yang diterima akan semakin banyak. Namun, kemampuan untuk mengelola informasi terbatas sehingga pemilih cenderung untuk memilih kandidat hanya berdasarkan isu-isu yang bermunculan di berbagai sumber yang dapat mempengaruhi pemikiran pemilih secara rasional.

Melihat fenomena pemilu serentak yang banyak mempunyai kepentingan begitu besar, justru kepentingan pemilih terlupakan begitu saja. Memasuki pergelaran pemilu, pemilih hanya diposisikan sebagai objek dalam area pertarungan konstelasi politik antara peserta pemilu, yang dilakukan oleh partai politik maupun para calon kandidat. Dari penjelasan di atas, menurut Wardani dalam Perludem (2014, p. 3) kondisi ini akan menghasilkan sederetan daftar apatisme masyarakat terhadap proses pemilu, karena kepentingan pemilih belum terakomodir dengan baik.

Menurut Halim & Lalongan (2016, p. 19) sejak tiga kali pemilu terakhir, tingkat partisipasi politik warga atau pemilih terus memperlihatkan penurunan. Angka penurunannya pun relatif besar karena selalu atau di atas kisaran 10%. Berikut adalah data partisipasi pemilih dalam pemilu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap dan Tingkat Partisipasi Warga Indonesia dalam Pemilu

	1999	2004	2009	2014
Daftar Pemilih Tetap	117.851.053	147.105.295	171.265.442	186.569.233
Tingkat Partisipasi	92,99%	84,07%	70,09%	72,00%

Sumber: KPU RI dalam (Halim & Lalongan, 2016)

Berdasarkan tabel di atas, hal berbeda terjadi di pemilu 2014. Walaupun terjadi peningkatan, partisipasi pemilih sebesar 72% belum menjadi suatu hal yang istimewa. Secara umum partisipasi pemilih di Indonesia masih menunjukkan angka yang kurang menggembarakan. Angka partisipasi pemilih pada pemilu 2014 masih belum mencapai target yang di realisasikan oleh KPU Republik Indonesia sebesar 75% secara nasional. Tingginya target partisipasi pemilih dimaksudkan agar pemilu memiliki tingkat legitimasi yang tidak meragukan dan diakui oleh rakyat sebagai suatu sistem regeneralisasi demokrasi, kepercayaan terhadap sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili masyarakat untuk memerintah dengan menjadi perwakilan rakyat di parlemen (Nurhasim,et al.,2014, p.2).

Antusiasme pemilih muda terhadap pemilu sebenarnya sudah terasa sejak pemilu 2004. Untuk pertama kali dalam hidupnya, mereka akan menjalankan hak politiknya (Wiwoho, 2014, para.1). Berdasarkan data KPU

jumlah pemilih muda di edisi pemilu di Indonesia terus mengalami peningkatan, diantaranya:

Tabel 1.3 Daftar Pemilih Muda

Pemilu	Pemilih Muda
2004	27 juta (18,4 %)
2009	36 juta (21 %)
2014	52 juta (40 %)

Sumber: (KPU dalam Kompas, 2014)

Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP2) oleh KPU memutuskan terdapat kenaikan jumlah pemilih mencapai 192.828.520 jiwa pada Desember 2018. Dalam catatan angka tersebut Ceo Alvara Research, Hasanuddin Ali, menyatakan suara pemilih muda/milenial akan menjadi penentu utama dalam pemilu 2019. Lebih lanjut, menurut survei Alvara, memperkirakan pada pemilu 2019 mendatang suara pemilih muda (Gen Z dan Milenial) dengan rentang usia 17 – 40 tahun mencapai 84,5 juta jiwa atau 44, 6 persen (Mohammad, 2019, para. 5).

Partisipasi pemilih muda dalam proses politik atau pemilihan umum (pemilu) bukan fenomena baru di Indonesia. Di dalam golongan usia pemilih muda terdapat kelompok pemilih pemula atau biasa di kategorikan sebagai generasi Z. Berdasarkan data KPU kelompok umur pemilih pemula adalah pemilih yang mempunyai rentang umur 17 tahun hingga 20 tahun.

Tabel 1.4 Kategorisasi Suara Pemilih Pemula

Usia	Jumlah (Juta)
17-20	17,5 Juta
21-30	42,8 Juta
31-40	43,4 Juta
40 ++	85,9 Juta

Sumber: (KPU dalam SindoNews.com, 2019)

Di dalam setiap edisi pemilu di Indonesia, keberadaan kelompok pemilih pemula merupakan kategori kelompok yang menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh ketika pelaksanaan pemilu berlangsung. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan memberikan hak suaranya dalam pemilu. Sementara pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 juta jiwa.

Melihat data tersebut menurut Direktur Eksekutif *The Political Literacy Institute*, Gun Gun Heryanto, potensi suara pemilih pemula dalam setiap pemilu selalu menjadi salah satu lapis pemilih yang menentukan (Munir, 2018, Para.3).

Bertambahnya angka pemilih pemula bertolak belakang dengan survei yang dilakukan oleh Alvira. Menurut survei tersebut, sekitar 78 % generasi milenial atau pemilih muda menunjukkan kecenderungan apatis dan cuek terhadap dinamika politik yang terjadi. Kaum milenial beranggapan bahwa politik merupakan hal yang kaku, membosankan, dan politik itu hanya

menjadi tontonan orang tua saja. (“*Millenial Cuek Dengan Politik*”, 2018, para. 1-8).

Lebih lanjut, berdasarkan temuan dari Heryanto dalam Bakti (2012, p. 130), karakteristik pemilih pemula masih sering direpresentasikan sebagai:

1. Pemilih yang masih labil cenderung apatis.
2. pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang rendah.
3. Pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (*peer group*)
4. Pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusung partai politik.
5. Pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara hanya sekedar untuk membatalkan atau menggugurkan haknya.

Dari pemaparan mengenai karakteristik pemilih pemula di atas, fakta-fakta tersebut menjadi bagian masalah yang diangkat dalam penelitian ini. peneliti menyadari bahwa pemilih pemula di pemilu serentak 2019 ini, masih gamang untuk terlibat langsung dalam pemilu. Kegamangan pemilih pemula bukan tanpa sebab, karena pemilih pemula masih sering dikonotasikan sebagai pemilih yang belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan pemilu.

Masalah ini dikarenakan karena tingkat pengetahuan politik yang rendah sehingga kesadaran berpolitik pemilih pemula di pemilu untuk menyatakan hak pilihnya masih tergolong rendah.

Menurut Fachrudin (2018, para. 9) pemilih pemula dewasa ini menghadapi kendala di dalam pelaksanaan pemilu serentak. Perubahan mekanisme tata cara pelaksanaan pemilu serentak membuat pemilih pemula acap kali dilema khususnya pemberian suara di tempat pemungutan suara. Terlebih pada pemilu serentak ini surat suara yang harus di coblos oleh pemilih pemula cukup banyak yang dimana belum mereka temukan pada pemilu sebelumnya. Menurut Fachrudin, banyaknya surat suara yang akan dipilih bukan tidak mungkin, pemilih pemula tidak mengetahui sah dan tidak sahnya pencoblosan surat suara.

Efektifitas pemilih pemula terhadap politik dalam kaitan dengan pemilu perlu di atasi bersama. Mengingat suara mereka yang besar dan menentukan. Hal ini menjadi dorongan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Media Pers bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu, dan cara menumbuhkan literasi politik tentang pentingnya sektor pemilu di dalam kehidupan mereka.

Menurut Affifudin dalam Perludem (2014, p. 65) ketidaktahuan akan pembahasan pemilu di kalangan pemilih pemula bisa jadi disebabkan, karena sosialisasi pemilu dan pendidikan politik yang kurang. Semakin minim aktivitas pendidikan politik maka akan mengurangi diskursus soal politik di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut akan membuat masyarakat / pemilih pemula tidak peduli dengan apa itu partisipasi dalam pemilu, dan hal apa yang mesti mereka lakukan untuk memperkuat sistem demokrasi. Sulit

mengharapkan tingginya partisipasi pemilih pemula dalam proses pemilu kalau mereka jarang mendapatkan pendidikan politik.

Menjelang pemilu serentak 2019, KPUD Kota Tangerang terus mengupayakan giat sosialisasi kepada pemilih pemula untuk secara partisipatif terlibat dalam kepemiluan. Penggunaan media/saluran kampanye juga menjadi perhatian bagi KPUD untuk menciptakan efek kepada pemilih pemula. Merujuk Andiningsari (2009, p. 3), media spanduk merupakan salah satu bagian dari periklanan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada publik berupa informasi dengan mengaplikasikan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa/pesan yang terkandung dalam materi iklan merupakan unsur komunikasi terpenting dalam upaya memengaruhi publik dan juga didukung dengan penggunaan gambar, bahasa, dan kalimat yang mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan iklan berhasil mengambil perhatian publik apabila mempunyai unsur tersebut.

Bila dikaitkan penggunaan media kampanye KPUD, peneliti berasumsi bahwa penggunaan media visual (spanduk) cocok digunakan dalam media berpolitik. Melalui spanduk komunikator bisa menyampaikan pesan pemilu kepada masyarakat dan menyosialisasikan gerakan sadar pemilu serentak 2019. Menurut Venus (2018, p. 148), spanduk sebagai media kampanye memiliki karakteristik sebagai berikut, murah, praktis, mampu menampung pesan verbal dan visual, dan mudah ditempatkan di lokasi strategis.

Melihat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu sangat mempengaruhi legitimasi, oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menyemarakkan pesta demokrasi melalui gerakan sadar pemilu (GSP) guna mewujudkan tagline “Pemilih berdaulat, negara kuat”. Gerakan sadar pemilu merupakan sebuah gerakan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemiluan.

Anjuran gerakan sadar pemilu mempunyai 7 poin utama yang terus disosialisasikan kepada oleh KPUD Tangerang yang wajib masyarakat kenali, yakni sebagai berikut:

1. Milikilah kartu tanda penduduk
2. Pastikanlah diri anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap
3. Telusuri profil dan rekam jejak calon
4. Santun dalam berkampanye
5. Gunakanlah hak pilih pada tempat pemungutan suara (TPS)
6. Kenali surat suara dan tata cara memilih yang benar
7. Kawal jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara

Pesan gerakan sadar pemilu di atas merupakan bagian dari pendidikan pemilu kepada pemilih dari KPUD yang terkoneksi melalui aktivitas utama seperti *KPU goes to School/Campus*, relawan demokrasi dan menyelenggarakan pameran/*event* guna meningkatkan kesadaran pemilu bagi pemilih pemula di Kota Tangerang demi tercapainya partisipasi pemilih pemula di pemilu serentak.

Dengan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu Oleh KPU Kota Tangerang terhadap partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang. Objek penelitian diarahkan kepada siswa kelas 12 SMAN 1 Tangerang dengan beberapa pertimbangan, yaitu dari segi usia mereka sudah memiliki hak memilih karena sudah 17 tahun dan mereka pernah mengikuti rangkaian sosialisasi kepemiluan yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Tangerang.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kampanye gerakan sadar pemilu yang di sosialisasikan KPU Kota Tangerang memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah :

1.2.1 Adakah pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang.

1.2.2 Seberapa besar pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul “Pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang”

1.3.1 Mengetahui adakah pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang.

1.3.2 Mengetahui berapa besar pengaruh pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi pemilih pemula di SMAN 1 Tangerang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Kegiatan ini penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara lebih rinci kegiatan kampanye serta output dari hasil kampanye itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya, khususnya pada penelitian yang membahas mengenai pemilih pemula yang baru memiliki hak memilih, penelitian ini menjelaskan bagaimana pesan kampanye gerakan sadar pemilu pada pemilih pemula berdasarkan data-data yang dihasilkan penulis selama penelitian.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi KPU RI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perkembangan kampanye dalam ranah politik.

Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dari hasil evaluasi, diharapkan penyelenggara KPU RI yang dijadikan objek bagi peneliti dapat merancang sebuah program yang semakin efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu.